



Indonesia for Global Justice

APA & MENGAPA KELOMPOK G33

Kelompok G 33

Kelompok G 33 merupakan kelompok dari negara-negara berkembang dan negara kurang berkembang yang menyatukan dirinya untuk bersikap dan bersuara secara kritis terhadap dimasukkannya masalah & isu pertanian pada sistim perjanjian perdagangan global. Negara-negara yang tergabung dalam Kelompok G33 meminta agar perjanjian perdagangan yang terkait dengan komoditas pertanian, harus diberlakukan secara khusus yang bersifat spesial dan berbeda (*Special & Differential Treatment*).

Pertimbangannya adalah bahwa produk pertanian bagi negara berkembang bukan cuma sebuah komoditi perdagangan belaka, namun budidaya pertanian merupakan sebuah mata rantai panjang yang menyentuh aneka ragam mata pencaharian rakyat banyak dan terkadang menjadi satu-satunya sumber pemenuhan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu infrastruktur dan kebijakan sektor pertanian di negara berkembang tidak selengkap dan sebesar yang ada dinegara maju, sehingga hasilnya pun tentu jauh berbeda. Sebagai salah satu negara yang berbasis agraria, Indonesia bersama Filipina dipercaya menjadi koordinator sekaligus pemimpin (*Team Leader*) dalam Kelompok 33 yang kini beranggotakan sekitar 46 negara.

Ke 46 negara yang menjadi anggota Kelompok G 33, diantaranya adalah; Antigua & Barbuda, Barbados, Belize, Benin, Bolivia, Botswana, China, Congo, Co'te de Ivory, Cuba, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Republic Korea, Madagascar, Mauritius, Mongolia, Mozambique, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, St Kitts & Nevis, St Lucia. St Vincent & Grenadines, Senegal, Sri Lanka, Suriname, Tanzania, Trinidad & Tobago, Turkey, Uganda, Venezuela, Zambia, dan Zimbabwe.

APA & MENGAPA KELOMPOK G 33

Mengapa isu pertanian perlu dikritisi ?

Umumnya sebagian besar masyarakat negara berkembang hidup dalam sektor pertanian. Sayangnya sekitar 50 % dari total jumlah orang kelaparan di dunia adalah mereka dari golongan petani kecil (*UN Millenium Project, 2005*).

Pada tahun 2008 sekitar 41,7 juta rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan (LIPI, 2008). Sementara menurut *UN Millennium Development Project*, dari sekitar 80 persen penderita kemiskinan akut berada di wilayah pedesaan. Nilai Tukar Petani (NTP) yang berfluktuasi pada angka yang rendah, menandakan pendapatan petani sudah tak sebanding dan bahkan jauh dengan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari.

Di Indonesia sendiri terdapat hampir 25,3 juta keluarga petani, dimana lebih 60 persen melibatkan tenaga kerja kaum perempuan. Mereka umumnya petani gurem yang hanya memiliki lahan kurang dari seperempat hektar. Di banyak daerah, ironisnya kasus kelaparan dan malnutrisi terjadi di pedesaan yang tak jarang berada di wilayah lumbung pangan.

Jika sektor pertanian diliberalisasikan maka negara berkembang termasuk Indonesia tidak memiliki kemampuan bersaing dengan negara-negara maju. Ini disebabkan karena pertanian dinegara maju mendapatkan berbagai macam kebijakan dan subsidi yang sangat besar dari pemerintahnya, hasilnya tentu saja berlimpahnya produk panen mereka akan masuk dan membanjiri pasar negara-negara berkembang. Serbuan hasil panen mereka secara perlahan namun pasti, akan menyudutkan dan kemudian mematikan produk-produk pertanian lokal. Akibat yang lebih buruk lagi, ketika hasil pertanian lokal berada pada titik terendah, maka bahan pangan bagi jutaan perut rakyat negara berkembang, akan sangat tergantung dari hasil impor produksi pertanian dari negara maju. Inilah yang sering disebut sebagai bencana pertanian.

Pendapat mengenai pentingnya sektor pertanian bagi negara agraris bukan semata-mata dilihat dari produk yang dihasilkannya saja, namun lebih jauh seperti hilangnya kedaulatan pangan sebuah negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dua tahun lalu ketika membuka *G-33 Ministerial Meeting*, Maret 2007 di Jakarta mengatakan bahwa "Sektor pertanian sangat penting artinya bagi arah & strategi pembangunan Indonesia, karena sektor tersebut tidak hanya mempengaruhi pendapatan masyarakat Indonesia yang sebagian besar merupakan masyarakat pedesaan dan sumber penghidupan bagi sekitar 25 juta petani, akan tetapi sektor pertanian sangat menentukan kelangsungan hidup bagi 50 persen masyarakat miskin yang ada Indonesia"

APA & MENGAPA KELOMPOK G 33

Masalah yang dibahas dalam Kelompok G 33

Didalam perjanjian perdagangan global WTO terdapat bentuk perlakuan khusus yang semestinya dapat digunakan oleh masing-masing negara guna melindungi kepentingan rakyatnya. Seperti misal dalam perjanjian pertanian (*Agreement on Agriculture*) dikenal pemberlakuan SP's (*Special Products*) dan SSM (*Special Safeguard Mechanism*). SP's dan SSM adalah sebuah cara perlakuan khusus yang dapat diterapkan oleh suatu negara untuk tidak membuka pasarnya dengan cara memberikan larangan atau mekanisme pembatasan impor terhadap produk-produk pertanian yang rentan terhadap perubahan harga, dikarenakan masuk dan membanjirnya komoditi hasil impor dari negara lain.

Persoalannya adalah bagaimana menentukan bahwa produk-produk impor yang beredar tersebut, sudah dan sedang menjadi ancaman (*injury*) terhadap produk-produk lokal yang ditengarai akan mengancam dan mematikan keberlangsungan kehidupan petani disebuah negara?

Seperti kita ketahui di banyak negara berkembang, catatan-catatan maupun data-data yang teruji keabsahannya tentang produk pertanian yang dihasilkan, jumlah dan posisi petani dan serta gambaran akan prosesi terjadinya ancaman belum tersedia dengan baik, sehingga tidaklah mengherankan manakala pemerintah diminta untuk mengukur seberapa besar tingkat kegentingan-kegentingan yang ada mereka akan menemui kesulitan besar.

Perdebatan dalam cara penentuan inilah yang menjadi agenda setiap pertemuan yang membahas SP's & SSM antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang tergabung dalam Kelompok G 33. Untuk kasus Indonesia misalnya, masuknya 50 persen garam impor sudah mengancam ribuan petambak garam di Jawa Timur & Madura, demikian pula masuknya sapi bakalan dari Australia yang pada tahun 2008 mencapai lebih dari 600.000 ekor dan daging sapi ekivalen dengan hampir 200,000 ekor nyata-nyata telah membawa ribuan peternak sapi kita tersingkirkan. Sementara peternak & koperasi susu lokal diberbagai daerah sudah banyak yang tutup karena membanjirnya produk susu impor dari Selandia Baru. Kejadian semacam ini yang terus berulang dan bertambah besar angkanya akan membawa petani termasuk jutaan anggota keluarga mereka masuk kelingkaran kemiskinan yang baru dan terancam musibah kelaparan

Apa yang dapat kita lakukan?

Setelah mengalami tidur panjang karena sejak 27 Juli 2006, kegiatan WTO dihentikan sementara waktu, maka pada 30 November 2009 hingga 2 Desember 2009 yang akan datang bertempat di Jenewa, Swiss akan dilangsungkan pertemuan tingkat menteri (KTM) Ke VII guna membahas agenda-agenda perdagangan global WTO. Dapat dipastikan bahwa pertemuan tersebut akan menjadi arena pertarungan yang seru antara negara-negara maju yang mempunyai prinsip perlunya pasar bebas atau liberalisasi perdagangan untuk menyelematkan krisis keuangan global yang melanda negara mereka, dengan

APA & MENGAPA KELOMPOK G 33

negara-negara berkembang termasuk diantaranya yang tergabung dalam Kelompok G 33 yang didukung oleh hampir 100 negara yang akan tetap bertahan dengan berbagai upaya guna melindungi keberadaan industri dan sektor pertanian didalam negerinya.

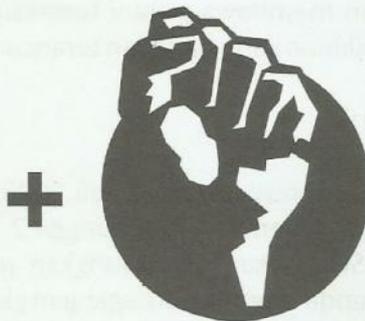
Berkaitan dengan hal tersebut, maka ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan guna memperkuat tujuan keberadaan Kelompok G 33.

1. Kirimkan petisi dan himbauan (yang formatnya ada dalam lampiran ini) kepada Menteri Perdagangan Republik Indonesia selaku Ketua delegasi Republik Indonesia dalam KTM VII WTO di Jenewa sekaligus Koordinator dari Kelompok G 33 sebagai bentuk kepedulian kita terhadap permasalahan sektor pertanian dalam sistim perdagangan global.
2. Memperkuat solidaritas kepada masyarakat petani, kaum buruh dan nelayan, dimana mereka merupakan korban terdepan dari pemberlakuan perdagangan global yang tidak adil ini.
3. Masyarakat konsumen dapat berperan serta untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan kebangsaan kita dengan cara untuk lebih memilih produk-produk yang berasal dari hasil pertanian lokal, ketimbang produk impor sepanjang hal tersebut dimungkinkan.

beberapa langkah yang dapat kita lakukan:



KIRIMKAN PETISI & HIMBAUAN



MEMPERKUAT SOLIDARITAS



MEMILIH PRODUK LOKAL